

Analisis Keberhasilan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia

Jafar Ahmad

Institut Agama Islam Negeri Kerinci
jafar@iainkerinci.ac.id

Abstract: *The jihad resolution initiated by the founder of Nahdlatul Ulama (NU), Hadratus Syaikh Hashim Asyari, at the beginning of the independence of the Republic of Indonesia (October 1945), proved successful in moving the Islamic masses to fight the Dutch invaders who tried to return to ride the allies in Surabaya. An unequal battle against a heavily armed foreign army. The question is, why did the resolution of jihad work? What factors can mobilize the Muslim masses so as to welcome the resolution of jihad? Will the resolution of jihad remain relevant if it is implemented in the present or in the future? The data in this research was obtained through literature reviews, both in indexed journals and book reviews, and by analyzing information in a number of mass media. The findings of this research indicate the success of the resolution of jihad in mobilizing the Islamic masses during the independence period because of a number of things. First, the momentum of the proclamation of August 17, 1945. The moment made all Indonesian people solid, especially Islam. Second, the massive mobilization of resources among Islamic boarding schools, especially the formation of militant masses due to the growth of a kind of belief that welcoming the resolution of jihad is mandatory and when syahid will be rewarded with Paradise. Third, the success of the framing of the fatwa of jihad was because it was initiated by high-reputed scholars and then spread massively by scholars through boarding schools so as to stimulate collective action.*

Keyword: *Independence of Indonesia, NKRI, struggle, jihad resolution, students, ulama NU.*

Abstrak, Resolusi Jihad yang dicetuskan pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hadratus Syaikh Hasyim Asyari, pada awal kemerdekaan Republik Indonesia (Oktober 1945), terbukti berhasil menggerakkan massa Islam untuk melawan penjajah Belanda yang mencoba kembali datang menunggangi sekutu di Surabaya. Pertempuran yang tidak seimbang melawan tentara asing yang bersenjata lengkap. Pertanyaannya, mengapa resolusi jihad itu berhasil? Faktor-faktor apa saja yang dapat memobilisasi massa muslim sehingga menyambut resolusi jihad? Apakah resolusi jihad itu akan tetap relevan jika diterapkan di masa kini atau di masa yang akan datang? Data di dalam riset ini diperoleh melalui kajian literatur, baik pada jurnal terindeks, telaah buku hingga menganalisis informasi di sejumlah media massa. Temuan riset ini menunjukkan keberhasilan resolusi jihad dalam memobilisasi massa Islam pada masa kemerdekaan itu karena sejumlah hal, pertama, adanya momentum Proklamasi 17 Agustus 1945. Momentum itu membuat seluruh rakyat Indonesia solid, terutama kalangan Islam. Kedua, terjadinya mobilisasi sumber daya secara besar-besaran di kalangan pondok pesantren, terutama terbentuknya massa militan akibat tumbuhnya semacam keyakinan bahwa menyambut resolusi jihad itu hukumnya wajib dan ketika syahid

akan diganjar dengan surga. Ketiga, berhasilnya pembingkaihan fatwa jihad karena dicetuskan ulama bereputasi tinggi, dan kemudian disebarkan secara massive oleh para ulama melalui pondok-pondok pesantren sehingga merangsang tindakan kolektif.

Kata Kunci : Kemerdekaan RI, NKRI, perjuangan, resolusi jihad, santri, ulama NU.

PENDAHULUAN

Ulama-ulama dan santri Nahdlatul Ulama (NU) berperan sangat penting dalam perjuangan merebut hingga mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari cengkeraman kolonialisme Belanda. Keyakinan akan mati syahid yang digelorakan ulama NU dari balik pintu masjid dan pondok pesantren telah membangun keberanian yang tinggi kepada rakyat untuk bangkit melawan (Royani, 2018).

Di tangan para ulama NU pula, kesadaran nasional akan pembebasan dari belenggu penjajah itu lahir dan membumbung tinggi. Islam sebagai agama yang diyakini mayoritas rakyat Indonesia telah menjadi pendorong lahirnya nasionalisme. Bahkan dapat dikatakan bahwa nasionalisme Indonesia dimulai dengan nasionalisme Islam. Gagasan nasionalisme dan cinta tanah air itu tumbuh subur bak cendawan di musim penghujan di relung-relung hati rakyat Indonesia. Kesadaran itu berkembang dengan amat cepat karena dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia (Airlangga, 2016).

Hal itu sejalan dengan pandangan Azyumardi Azra, seorang ilmuwan Islam terkemuka di Indonesia, yang menjelaskan bahwa loyalitas pada Islam di Indonesia telah memperkuat kesadaran akan pengalaman kesejarahan yang sama. Dalam pengertian ini, penjajah Belanda--yang secara teologis menurut ajaran islam adalah kafir--, telah mendorong rakyat Indonesia dari berbagai kelompok etnis untuk bersatu dalam naungan Islam. Di sinilah, kemudian sentimen etnisitas menjadi tidak relevan. Karena Islam menjadi pendorong munculnya nasionalisme, yang mampu menjinakkan sentimen etnisitas untuk menumbuhkan loyalitas kepada entitas lebih tinggi, yaitu agama Islam. Kenyataan ini juga terlihat dari kemunculan Sarekat Islam yang merefleksikan nasionalisme keIslaman-keIndonesiaan (www.islamalternatif.com)

Dalam upaya melahirkan gerakan nasionalisme itu, ulama NU memainkan peranan yang amat menentukan. Seperti dicatat oleh para pakar yang mengkaji tema nasionalisme di Indonesia, yang menjelaskan bagaimana Islam menjadi mata rantai yang menyatukan rasa persatuan nasional dalam menentang Belanda. Sebagaimana dikemukakan Fred R von Der Mehden, bahwa islam merupakan sarana paling jelas baik untuk membangun persatuan nasional maupun membedakan masyarakat Indonesia dari elite penjajah

Belanda. Menurut Mehden, sejak awal wilayah Islam tidak pernah tunduk di bawah kontrol Belanda hingga awal abad ke 20. Karena itu, Islam adalah satu-satunya ikatan universal yang tersedia di luar kekuasaan kolonial (Mehden, 1957).

Bukti lainnya dicatat oleh seorang peneliti senior CIDES, Firman Noor, dalam makalahnya yang berjudul “ Hebatnya Sarekat Islam Dahulu Kala”, yang menyebutkan pergerakan politik pembebasan di Indonesia dilandasi oleh semangat Islam yang lahir dari pondok-pondok pesantren, yang dibina oleh ulama tradisional (cikal bakal NU). Menurutnya, hal ini ditunjukkan oleh beberapa fakta empiris, pertama, adanya sebuah kenyataan historis bahwa umat Islam yang dipimpin oleh figur-figur ulama di pondok pesantren merupakan tokoh kunci yang menggerakkan rakyat untuk melawan kekuatan Belanda. Kedua, sebagai kelompok mayoritas di bumi nusantara memungkinkan Islam menjadi sebuah elemen yang berpotensi besar sebagai tali pengikat menyatukan kaum Bumiputra. Ketiga, umat Islam dan ulama-ulama berikut santrinya di pondok-pondok pesantren adalah kelompok marginal yang paling merasakan penderitaan lahir bathin dan terhinakan selama berabad-abad. Karena selain menjajah secara ekonomi, Belanda juga berupaya dengan gigih menyebarkan paham kristiani di nusantara. Keempat, kuatnya penetrasi ideologis tersebut, lambat laun menggoyahkan sendi-sendi kehidupan asli kaum Bumiputra. Di sinilah Islam kemudian di pandang relevan untuk dijadikan simbol pemulihan identitas dan jati diri anak bangsa. Kelima, dalam situasi demikian maka umat islam dan para ulamanya menjadi medium bagi rakyat dalam merebut keadilan dan kebebasan melalui pendekatan keIslaman yang lebih aktual (Noor, 2008).

Aqib Suminto, dalam bukunya politik Islam Hindia Belanda, menyebutkan adalah umat Islam yang dikomandoi para ulama telah berdaya upaya melepaskan diri dari cengkraman kekuasaan Belanda. Usaha Belanda untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya mendapat perlawanan keras dari raja-raja Islam, dan dari para guru serta ulama Islam di pondok pesantren. Suatu kenyataan yang memerlukan sikap serius Belanda dalam menghadapinya karena Islam melalui pondok-pondok pesantren itu selalu menyadarkan pemeluknya bahwa mereka di bawah cengkeraman pemerintah kafir dan bahwa cinta tanah air adalah termasuk sebagian dari iman (Suminto, 1985:1-10). Ketika kekuatan kerajaan Islam redup dan terseret dalam kekuasaan kolonialis, pesantren justru mengambil alih peran kontrol sosial dalam melindungi masyarakat. Pesantren mengubah diri menjadi kekuatan

penyeimbang melawan penjajah, menjadi pusat pelatihan jiwa raga, menyusun kekuatan baru, dan mengembangkan strategi bersama rakyat (Yanto, 2019).

Oleh karena itu, dalam sejarah kebangsaan, keberadaan kyai di pondok-pondok pesantren menjadi catatan tersendiri dalam sosial politik. Sejak pra kemerdekaan, kyai telah menjadi kekuatan epistemik dalam pergerakan sosial keagamaan yang mendobrak kekuatan Belanda yang dibangun di atas nalar-nalar kolonialisme. Kekuatan kyai terletak pada kemampuannya memobilisir massa dalam jumlah signifikan, sehingga potensial menjadi penghalang kaum kolonial mewujudkan ambisi-ambisinya di nusantara. Sejarah mencatat, berbagai pemberontakan di akhir abad ke 19 hingga awal abad ke 20 disponsori oleh elit agama, antarlain kyai dan ustad. Agitasi militan yang dikumandangkan para kyai di pondok pesantren, membuat Belanda semakin yakin bahwa kyai merongrong keberadaannya dalam menancapkan imperialisme di nusantara. Berbagai agitasi dan penentangan terjadi dalam dua bentuk : perang terbuka dan perang terselubung (Yanto, 2019:59-60). Pondok-pondok pesantren di bawah komando ulama memiliki andil besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Indonesia bagi kaum ulama dan santri adalah martabat dan harga diri. Dengan demikian, ikhtiar memproklamasikan kemerdekaan RI adalah upaya merebut harga diri dan memperjuangkannya (M, 2017).

Sudah banyak peneliti yang membahas mengenai peran ulama dan santri dalam kemerdekaan RI. Seperti penelitian yang dilakukan Eva Syarifah Wardah tentang kiprah ulama dalam politik pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945). Namun, dalam penelitiannya, Eva Syarifah hanya memotret bagaimana para ulama mewarnai gerak langkah perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Hasil risetnya menggambarkan ulama tidak saja menjadi pemimpin santri di pondok pesantren, tapi merupakan tokoh kunci dalam mengkapitalisasi rakyat dalam melawan penjajah (Wardah, 2010). Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Effendi yang memotret KH Ahmad Hanafiah sebagai sosok ulama NU pejuang kemerdekaan RI asal Lampung. Dalam riset nya, Effendi menyebutkan perjuangan mengusir penjajah dari bumi Nusantara dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI dikomandoi oleh para ulama dari pondok pesantren (Effendi, 2016).

Penelitian Inggar Saputra tentang “Resolusi Jihad : Nasionalisme Kaum Santri Menuju Indonesia Merdeka”, memotret bagaimana latar belakang kelahiran resolusi jihad, yang merupakan jawaban atas ketidakpastian yang melanda para pemimpin Indonesia dalam menghadapi penjajah. Secara

spesifik, Inggar menjelaskan bagaimana isi dari resolusi jihad yang merupakan manifesto dari nasionalisme ulama (Saputra, 2019). Kemudian riset Gunaji yang juga terkait dengan resolusi jihad dengan judul “Resolusi Jihad NU 1945, Peran Politik dan Militer NU Dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI”, secara spesifik hanya memotret faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya resolusi jihad NU tahun 1945. Lalu Gunaji menggambarkan dampak dari resolusi jihad NU baik terhadap NKRI maupun dampak bagi NU sendiri (Gunaji, 2009).

Namun, belum ada riset yang secara spesifik memotret mengapa resolusi jihad itu bisa berhasil. Apa saja faktor yang menyebabkan keberhasilan resolusi jihad tersebut? Lalu apakah resolusi jihad itu akan tetap relevan jika diterapkan di masa kini atau di masa yang akan datang? Penelitian ini selain menjawab sejumlah pertanyaan penting di atas, juga akan menggambarkan bagaimana resolusi jihad itu hanya akan berhasil jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Sehingga, jika syarat-syarat itu terpenuhi, maka resolusi jihad itu akan tetap relevan jika diterapkan, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Sebaliknya, penerapan resolusi jihad akan gagal jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi. Hal ini lah yang menjadi kebaruan atau novelty di dalam penelitian ini, yaitu menganalisis faktor-faktor keberhasilan resolusi jihad dalam memobilisasi massa muslim untuk berperang mengusir penjajah Belanda yang kembali datang ke Surabaya pasca Proklamasi 1945.

Temuan riset ini menunjukkan bahwa keberhasilan resolusi jihad itu dikarenakan sejumlah faktor, antara lain adanya momentum Proklamasi 17 Agustus 1945. Momentum itu telah membuat seluruh rakyat Indonesia solid, terutama kalangan Islam, sehingga seruan resolusi jihad itu disambut dengan gegap gempita. Kemudian, terjadinya mobilisasi sumber daya secara besar-besaran di kalangan pondok pesantren, terutama terbentuknya massa militan akibat tumbuhnya semacam keyakinan bahwa menyambut resolusi jihad itu hukumnya wajib. Mati dalam peperangan adalah syahid dan akan diganjar surga. Menolak atau menentangnya berarti berdosa dan tempatnya di neraka. Tidak saja mengobarkan jiwa, mereka menyambut resolusi jihad itu dengan pengorbanan materi. Selanjutnya, berhasilnya pembingkai fatwa jihad yang dikomandoi para ulama melalui pondok-pondok pesantren sehingga merangsang tindakan kolektif. Fatwa jihad itu dibingkai para ulama beserta santri-santri di pondok pesantren, sehingga melahirkan laskar-laskar jihad yang militant dan telah dilatih keterampilan militer. Seperti Laskar hizbullah yang berada di bawah komando KH Hasyim Asy’ari. Kemudian ada pula laskar

sabilillah yang dipimpin KH Masykur, pemuda pesantren dan anggota Ansor NU (ANU), yang merupakan pemasok paling besar dalam keanggotaan Hizbullah. Dari laskar santri inilah kemudian lahir Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan, sejak Bulan Desember 2021 hingga Februari tahun 2022. Pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan, bahwa analisis data kualitatif merupakan Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2018).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: studi Kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari informasi dari telaah buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, artikel-artikel, jurnal-jurnal, situs web, maupun bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Azizi, 2005).

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan eksplorasi terhadap proses resolusi jihad yang dari eksplorasi tersebut diharapkan dapat dijelaskan dinamika yang terjadi dalam resolusi jihad. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber (*multiple resources of data*). Artinya data dalam penelitian kualitatif tidak terpaku pada sumber data yang tunggal. *Multiple resources of data* memungkinkan peneliti untuk tidak hanya terpaku pada data penelitian yang telah dikumpulkan, namun juga membandingkannya dengan pemberitaan di media massa atau hasil penelitian sejenis yang telah ada sebelumnya. Teknik ini juga penting untuk meminimalisir bias data, yang mungkin terjadi akibat kecenderungan bersifat subjektif baik dari informan, media massa maupun dari interpretasi peneliti terhadap data tersebut.

Dalam hal analisis data, peneliti menerapkan metode analisis dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Data yang tidak sesuai direduksi atau tidak digunakan, sehingga data inti yang tersedia dapat digunakan sebagai dasar analisis. Data yang telah direduksi tersebut kemudian dikelompokkan lagi untuk disajikan dalam bentuk deskripsi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Resolusi Jihad Nu Dan Kebangkitan Rakyat Indonesia

Para ulama NU dari pondok-pondok pesantren tak pernah surut menggelorakan semangat kemerdekaan RI. Pada tahun 1945, para ulama NU memanfaatkan kelemahan Jepang yang mulai terjepit oleh sekutu, dengan membangun persiapan-persiapan menyongsong kemerdekaan. Dalam konteks inilah lahir laskar Hizbullah yang dibentuk para ulama NU di pondok-pondok pesantren (Bizawe, 2016).

Kyai Hasyim Asyari pada 21-22 Oktober 1945 mengumpulkan konsul-konsul NU di kantor Pengurus Besar Ansor Nahdlatul Ulama di Surabaya. Dalam pertemuan yang dipimpin KH Abdul Wahab Chasbullah, Kyai Hasyim mengeluarkan fatwa bertajuk resolusi jihad *fi sabilillah*. Isi resolusi jihad itu antara lain, perintah berperang melawan penjajah merupakan kewajiban *fardhu ain* bagi semua muslim, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, yang berada dalam jarak 94 KM dari tempat peperangan. Bagi kaum muslim yang berada di luar jarak tersebut, kewajiban berperang menjadi *fardhu khifayah*, artinya, cukup dikerjakan perwakilan atau sebagian saja (lipi.go.id)

Resolusi Jihad ini didasarkan atas dalil agama Islam yang mewajibkan setiap muslim membela tanah air dan mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fauzi, 2018). Resolusi jihad yang dikumandangkan itu langsung menyebar luas ke masyarakat. Resolusi jihad ini pula yang telah membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan Belanda yang memboncengi sekutu. Fatwa resolusi jihad kemudian menempati puncaknya pada saat kapal perang Inggris HMS Waveney menurunkan pasukan di dermaga Surabaya, pada 25 Oktober 1945. Pertempuran akhirnya tak terelakkan dan meletus selama empat hari empat malam, non stop, dari 26 sampai 29 Oktober 1945. Ribuan santri dan pemuda Surabaya tumpah ruah di jalanan. Mereka dengan semangat juang yang tinggi menyerang tentara asing yang menginjakkan kakinya di bumi Surabaya (nu.or.id)

Resolusi jihad tersebut tidak semata-mata dimaksudkan sebagai perjuangan membela agama Islam saja, tetapi juga membela kedaulatan bangsa Indonesia. Fatwa jihad itu mendorong para pejuang pantang mundur melawan kedatangan kolonial. Resolusi Jihad tersebut menyeru seluruh elemen bangsa, khususnya umat Islam untuk mempertahankan NKRI, yang sudah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Pertempuran 10 November 1945 meletus, laskar ulama santri dari berbagai daerah berada di garda depan dalam

pertempuran tersebut. Resolusi Jihad juga pecah di Semarang, bahkan telah mengiringi keberhasilan dalam Perang Sabil Palagan Ambarawa. Para laskar ulama santri juga terus melakukan pertempuran mempertahankan daerahnya masing-masing termasuk di tanah Pasundan dan daerah-daerah lainnya (Zuhri, 2008).

Menurut Martin van Bruinessen, lahirnya Resolusi Jihad tidak terlepas dari peran ulama NU. Setelah rapat darurat sehari semalam, maka pada 22 Oktober para ulama NU mendeklarasikan seruan jihad fi sabilillah yang kemudian dikenal dengan istilah Resolusi Jihad. Hal ini merupakan respon atas ancaman terhadap negara yang sudah diproklamasikan. Untuk itu, pertahanan rakyat yang dimobilisasi lewat resolusi jihad itu berperan penting dalam menjaga keutuhan negara. Selain resolusi jihad, para ulama NU itu juga mengirim surat resmi kepada pemerintah yang meminta segera menentukan sikap dan tindakan nyata terhadap usaha yang akan membahayakan kemerdekaan negara Indonesia. Para ulama mendorong pemerintah melanjutkan perjuangan bersenjata untuk tegaknya Negara Republik Indonesia yang merdeka (Nagazumi, 1989:99).

Hal ini menunjukkan bahwa kiprah ulama dan santri NU dalam membela negara tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada tahun 1943-1945 hampir semua pondok pesantren membentuk laskar-laskar, dan yang paling populer adalah laskar hizbullah dan sabilillah. Pada kurun waktu tersebut kegiatan pondok pesantren adalah berlatih perang dan olah fisik. Bahkan peristiwa-peristiwa perlawanan sosial politik terhadap penguasa kolonial, pada umumnya dipelopori oleh para kyai. Laskar hizbullah misalnya, berada di bawah komando spiritual KH Hasyim Asy'ari dan secara militer dipimpin oleh KH Zainul Arifin. Adapun laskar sabilillah dipimpin oleh KH Masykur (Zuhri, 2008).

Dengan slogan jihad fi sabilillah para ulama pesantren menjadi motor penggerak perjuangan. Mereka membakar semangat rakyat untuk berperang melawan Belanda. Oleh karena itu, muncul sederet nama pahlawan yang notabene berasal dari lingkungan pesantren, misalnya K.H. Hasyim Asy'ari. Kiprah pesantren dan umat Islam cukup besar dalam membangun jiwa nasionalisme dalam merebut kemerdekaan, seperti yang telah disampaikan Douwes Dekker "jika tidak karena pengaruh dan didikan agama Islam, maka patriotisme bangsa Indonesia tidak akan sehebat seperti yang diperlihatkan oleh sejarahnya sehingga mencapai kemerdekaan" (Royani, 2018).

Kiprah pesantren dan umat Islam dalam kemerdekaan RI cukup besar karena para tokoh pergerakan nasional tidak dapat dilepaskan dari dunia pesantren. Pondok pesantren tidak saja berperan sebagai lembaga pertahanan fisik, namun juga menjadi organ pertahanan yang bersifat mental maupun moral. Pemikiran Snouck Hurgronje yang berupaya mengasimilasikan kebudayaan Indonesia dengan budaya Belanda tidak mencapai keberhasilan karena sistem pertahanan masyarakat Indonesia saat itu didominasi pengaruh pondok pesantren. Hal ini karena tradisi dan corak santri yang tidak mudah berasimilasi dengan budaya Barat yang kental beragama Kristen (Royani, 2018).

Jihad yang dilakukan oleh ulama dan santri NU adalah jihad membela tanah air, sebagai bentuk cinta tanah air yang kemudian dimaknai sebagai jihad *fi sabilillah*. Menurut KH Hasyim Asy'ari, jihad merupakan satu amalan besar dan penting dalam Islam dengan keutamaannya yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu, menurut KH. Hasyim Asy'ari dalam konteks melawan penjajah Belanda, memberikan fatwa jihad mempertahankan tanah air Indonesia hukumnya wajib (Suryanegara, 2012).

Perjuangan para ulama dan santri NU untuk bangkit menghimpun kekuatan melawan pemerintahan asing yang dianggap kafir, merupakan bukti sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Bahkan menurut hitungan rasional kemerdekaan negara Indonesia ini tidak akan pernah terwujud, mengingat rakyat Indonesia pada saat itu merupakan rakyat yang miskin, serba kekurangan, untuk makan saja masih sulit. Demikian juga minimnya persenjataan yang dimiliki. Akan tetapi berkat motivasi para ulama dari pondok pesantren, hal itu menjadi sebuah sugesti besar untuk mengobarkan peperangan melawan penjajah. Maka dengan sugesti yang kuat ini perjuangan para ulama bisa menghantarkan kepada sebuah kemerdekaan (Suryanegara, n.d.).

Umat Islam di bawah komando para ulama telah memberikan warna yang terang dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Indonesia. Begitu mendalamnya torehan sejarah yang dipahat umat Islam di bumi Nusantara ini, sehingga kemanapun kita mencoba melacak jejak perjuangan di masa penjajahan, maka senantiasa pula akan ditemukan pijaran api semangat perjuangan Islam (Farih, 2017)

Ulama Nu Membentuk Basis Pertahanan Di Pondok Pesantren

Peran ulama dan santri NU di pondok-pondok pesantren dalam perjuangan melawan penjajah sudah muncul sejak kali pertama kaum penjajah datang ke Nusantara, sekitar abad ke 17. Ulama dan para santrinya yang hidup di tangsi-tangsi pesantren adalah kelompok pertama penentang upaya penjajah menguasai sumber daya alam Nusantara, di mana kedatangan mereka diiringi pula dengan misi kristenisasi. Faktor ini melahirkan semangat perlawanan yang sangat gigih di kalangan ulama dan umat Islam (Airlangga, 2016)

Para ulama tradisional (cikal bakal NU) telah mengajarkan Islam kepada umatnya di Nusantara sebagai sumber ilham dalam perjuangan kemerdekaan. Bahkan, para ulama ini pula yang membentuk anasir perjuangan dari pondok pesantren untuk melawan penjajah dengan semangat perang suci. Sehingga, secara ideologis hal itu dipergunakan dalam gerakan menumbangkan penjajah. Perlawanan-perlawanan yang dilancarkan umat Islam, seperti perang Banten pada abad ke 18, Perang Cirebon (1802-1806), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Paderi (1821-1838), Perang Banjarmasin (1852, 1859, 1862), dimotori sepenuhnya oleh kaum ulama yang bermukim di pondok pesantren. Pasca perang Diponegoro misalnya, masih ada sekitar 130 pertempuran yang melibatkan kalangan pesantren (Darban, 1990). Semua perang tersebut dilakukan dengan panji fisabilillah yang dikumandangkan dari pondok pesantren (Airlangga, 2016).

Milal dalam penelitiannya menyebut ulama dan santri NU sebagai pejuang bangsa. Dalam mengobarkan semangat perjuangan, ulama tradisional tidak saja membangun emosi kaum santrinya. Melalui pondok pesantren, perlawanan itu dibentuk melalui penyadaran dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, pembangunan aspek spiritual dan strategi perang. Pondok pesantren adalah basis utama pertahanan rakyat, karena di sanalah siasat pertempuran dirancang. Di sanalah penyadaran tentang nasionalisme dibentuk. Para ulama menurunkan ilmunya kepada kaum santri dengan semangat membela tanah air. Para ulama kemudian mengeluarkan fatwa jihad untuk memperteguh semangat juang. Demikian pula nilai-nilai spiritual ditanamkan para ulama sehingga santri dan rakyat memiliki daya tahan yang kuat melawan penjajah kendati dengan senjata seadanya. Fatwa jihad itu telah menjadi energi penting dalam membentuk keberanian dan menghilangkan rasa takut santri dan umat Islam dalam melawan penjajah. Para ulama juga menjadikan pondok pesantren untuk mengatur siasat perang dengan mencontoh strategi perang Rasulullah. Hal ini sebagaimana dijalankan oleh Pangeran Diponegoro dalam

melawan penjajah Belanda, yang mana prajurit dan pengawal setianya adalah merupakan kalangan santri dari pondok pesantren (Darban, 1990).

Pasukan inti Diponegoro misalnya, dipenuhi para ulama dan santri dari berbagai penjuru Jawa. Para ulama santri itulah yang meneruskan perjuangannya ketika Diponegoro ditangkap. Carey menemukan 108 Kyai, 31 Haji, 15 Syekh, 12 Penghulu Yogyakarta dan 4 Kyai guru menyebar dan mendirikan basis-basis perlawanan dengan mendirikan masjid-masjid dan pesantren-pesantren sepeninggalan Diponegoro (Bizawe, 2016)

Ulama-ulama seperti Syekh Nawawi Banten yang meneruskan perjuangan Syekh Yusuf Al-Makassari, Kyai Sholeh Darat yang meneruskan perjuangan ayahnya Kyai Umar Semarang, Syekh Mahfudz At-Tirmasi, cucu Kyai Abdul Manan, yang meneruskan perjuangan Kyai Hasan Besyari, Kyai Abdul Djamil dan Kyai Abbas Buntet-Cirebon yang meneruskan perjuangan Kyai Muta'ad, dan Syekh Hasyim Asy'ari serta Kyai Wahab Hasbullah keturunan Kyai Abdus Salam Jombang, telah berhasil membangun jaringan ulama Nusantara yang berkontribusi penting bagi terbangunnya pergerakan nasional menegakkan negara Indonesia (Dhofier, 2015).

Memasuki abad ke 20, perlawanan Islam menggunakan metode baru, yang melalui elit terdidik dan aktivitas organisasi modern. KH Wahab Chasbullah bersama KH Mas Mansyur pada tahun 1914 mendirikan sebuah kelompok diskusi, Tashwirul Afkar atau potret pemikiran. Kemudian KH Wahab Chasbullah juga membentuk Islam Study Club di Surabaya. Selain berhasil menarik kalangan pemikir Islam tradisional, keberadaannya juga menarik minat para tokoh pergerakan lain termasuk para tokoh nasionalis-sekuler seperti pendiri dan pemimpin organisasi budi utomo, dr Sutomo. Kemudian para ulama tradisional tersebut mendirikan kelompok kerja yang dinamakan Nahdlatul Wathan atau kebangkitan tanah air (Bizawe, 2016).

Pergerakan ini pada akhirnya melahirkan madrasah dengan corak nasionalis-moderat yang tersebar di daerah-daerah Jawa Timur dan dipimpin langsung oleh kedua kyai itu. KH Wahab terus bergerak bersama Abdullah Ubaid dan membentuk sebuah organisasi pemuda muslim dengan nama Syubbanul Wathon (pemuda tanah air) di Surabaya. Atas kesepakatan para ulama pesantren pula, akhirnya terbentuklah organisasi Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada tahun 1926 di Kota Surabaya. Organisasi ini dipimpin oleh KH Hasyim Asy'ari sebagai rais akbar (Dhofier, 2015). Pada periode kolonial, pihak yang selalu konsisten anti kolonial adalah para ulama-

santri tradisional sehingga mereka terus menjaga tradisi perlawanan melawan kolonial (Royani, 2018).

Peran Ulama Nu Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia

Ulama NU adalah kelompok yang berperan penting dalam usaha mempertahankan Republik Indonesia, yang sudah diproklamasikan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Para ulama memobilisasi para santri dari pondok pesantren untuk mengikuti pendidikan militer, yang saat itu sempat dilatih oleh Jepang di bawah bendera Tentara Pembela Tanah Air (PETA). Pada akhirnya, tentara PETA inilah yang nantinya akan menjadi embrio terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ulama NU memiliki semboyan dalam perjuangannya, yaitu hidup mulia atau mati syahid. Kekuatan ini yang nantinya sangat gesit mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa sangat terang dan jelas peranan ulama dan kyai di garis depan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia (Novia, 2018).

Begitu juga dengan politik. Peran ulama NU dalam membangun Republik yang baru lahir itu sangat fundamental. Para ulama NU pada awal kemerdekaan ikut menjadikan Masyumi sebagai afiliasi politik dan menempatkan kadernya di pemerintahan. Seperti yang sudah disinggung di atas, resolusi jihad yang difatwakan ulama, telah mendorong lahirnya perlawanan bangsa Indonesia melawan tentara Inggris di Surabaya tanggal 10 November 1945. Kemudian resolusi jihad pula yang melahirkan perang Sabil Ambarawa, tanggal 14 Desember 1945. Pengaruh dan peranan ulama dalam peperangan melumpuhkan militer sekutu, sangat tampak jelas di barisan depan. Kemenangan pasukan rakyat itu dikomandoi Kiai Muchlish dari Cilacap. Kemenangan di Ambarawa inilah yang menjadikan Soedirman diangkat menjadi Panglima besar Tentara Keamanan Rakyat (Amin, 2020).

Faktor Keberhasilan Resolusi Jihad NU

Ada tiga alasan mengapa resolusi jihad NU tersebut berhasil. Tiga alasan itu, dapat dijelaskan melalui pendekatan teori gerakan sosial. Janine A Clarck dkk, dalam bukunya *Gerakan Sosial Islam*, (Clarck, 2012:48-66) menjelaskan tiga faktor penting yang menyebabkan gerakan sosial itu berhasil. Pertama, adanya momentum atau kesempatan politik. Menurutnya, gerakan-gerakan sosial tidak beroperasi dalam ruang hampa. Ia tumbuh dan terbentuk karena

adanya kesempatan politik. Dalam konteks penelitian ini, momentum proklamasi yang telah dikumandangkan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, telah melahirkan rasa persatuan dan kebangsaan yang tinggi di kalangan rakyat Indonesia. Terbentuknya solidaritas yang kuat di kalangan elit pemerintah dan aktor-aktor politik, baik dari kelompok agama, nasionalis maupun kiri (komunis), yang mana para aktor-aktor ini sempat berkonflik dan berpecah di masa sebelum kemerdekaan (Pemerintah Hindia Belanda).

Proklamasi yang membentuk Indonesia sebagai sebuah Negara tersebut, menyebabkan elit-elit atau aktor-aktor politik yang pada awalnya pro terhadap Pemerintah Hindia Belanda--karena memperoleh banyak sumber daya, jabatan dan materi, khawatir untuk berbelok karena akan dianggap pengkhianat terhadap bangsa sendiri. Soliditas elit terbentuk karena ada ancaman akan dianggap sebagai pengkhianat Negara. Kesempatan politik itu juga datang dari kekalahan Jepang yang digempur oleh Amerika Serikat, sehingga pada masa itu (ketika resolusi jihad dikumandangkan), rakyat Indonesia memperoleh banyak senjata dari tentara Jepang, yang personilnya telah kabur ke negaranya. Sehingga, ketika Belanda mencoba datang kembali menjajah, dengan memboncengi sekutu di Surabaya, rakyat Indonesia yang telah merasa memiliki Negara Indonesia, tersulut semangat berjuang untuk mempertahankannya. Resolusi jihad makin menguatkan semangat untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan tersebut. Jihad membela tanah air, seperti yang diungkap Kyai Hasyim Asyari, kemudian diterjemahkan sebagai seruan jihad *fi sabilillah*, yang merupakan amalan besar dengan keutamaan yang banyak sekali. Mempertahankan Negara dari serangan penjajah, hukumnya wajib. Kondisi ini lah yang makin menguatkan posisi resolusi jihad. Merujuk pada syarat-syarat terjadinya gerakan sosial, maka, resolusi jihad telah memenuhi persyaratan pertama, yaitu adanya momentum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jika Indonesia belum terbentuk sebagai sebuah Negara, sulit memobilisasi rakyat karena tidak ada Negara yang wajib dipertahankan. Sehingga, tanpa adanya momentum kemerdekaan tersebut, resolusi jihad tidak akan memperoleh tempat dan dukungan yang luas dari masyarakat Indonesia.

Syarat kedua yang dapat melahirkan gerakan sosial, menurut Janine A Clark adalah mobilisasi sumber daya. Menurut Janine, mobilisasi sumber daya itu dapat terbentuk karena adanya ketegangan yang terjadi antara massa dengan struktur pemerintah. Ketegangan dipicu karena respon atas ketidakpuasan, kekecewaan yang terjadi terhadap rakyat banyak. Dalam konteks penelitian ini,

kekecewaan dan ketidakpuasan itu telah mendarah daging di hati rakyat Indonesia terhadap Pemerintah Hindia Belanda, yang telah berkuasa selama lebih dari 3,5 abad. Karena selama kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda, rakyat mengalami diskriminasi, kemiskinan dan kesengsaraan. Kalangan Islam adalah kelompok yang mendapat perlakuan diskriminasi dan kesengsaraan terbesar semasa penjajah Belanda. Seperti yang telah disinggung di atas, di mulai pada tahun 1905, ketika kerajaan Belanda dikuasai kelompok agama Kristen, segera setelah itu kebijakan pemerintah Hindia Belanda cenderung memaksa Kristen menjadi agama di Nusantara. Mereka menjadikan kalangan ulama dan santri yang hidup di pondok-pondok pesantren, sebagai musuh utama yang harus dihancurkan. Atas perlakuan diskriminatif itu, keberadaan fatwa resolusi jihad disambut dengan pengorbanan yang tinggi, hal itu sebagai respon atas ikhtiar untuk tidak ingin kembali dijajah dan menjadi kelompok yang diperlakukan tidak adil oleh Belanda. Sehingga, pondok-pondok pesantren beserta santrinya, yang telah membentuk laskar-laskar rakyat, sangat mudah dimobilisasi lewat seruan resolusi jihad. Ketegangan yang terjadi antara Belanda versus ulama serta kelompok Islam tradisional di pondok pesantren di masa sebelum kemerdekaan menempatkan resolusi jihad sebagai instrumen untuk mengobarkan perlawanan. Kalau di masa pra kemerdekaan, perlawanan kelompok Islam terhadap Pemerintah Belanda dianggap sebagai sebuah pemberontakan, maka, peperangan di masa setelah kemerdekaan dianggap sebagai jihad dan kewajiban yang harus ditunaikan. Sehingga, resolusi jihad telah memenuhi syarat keduanya, yaitu terjadi mobilisasi sumber daya. Dalam konteks ini, telah terjadinya pengerahan materi (semua orang mengobarkan hartanya), mobilisasi massa dari kalangan santri pondok pesantren, sebagai respon terhadap hukum wajib mempertahankan Negara.

Syarat ketiga gerakan sosial, kata Janine A Clark adalah framing atau pembedaan. Gerakan sosial baru akan terjadi jika terjadinya proses pembedaan isu yang dilakukan secara massive dan terus-menerus. Sehingga, melalui framing tersebut, peserta gerakan sosial merasa yakin untuk ikut bergerak. Bingkai, menurut Janine merupakan skema yang memberikan sebuah bahasa dan sarana kognitif untuk menghasilkan gerakan guna memobilisasi para peserta. Ada agen atau aktor yang mengkonstruksi isu dan menyebarkannya ke peserta gerakan. Pembedaan bisa dalam bentuk simbol, bahasa dan identitas sehingga memperkuat mobilisasi.

Dalam hal ini, reputasi agen pengkonstruksi isu berperan sangat penting. Kredibilitas penyampai isu dan konsistensi bingkai menjadikan gerakan

tumbuh dan hidup. Merujuk pada syarat ketiga gerakan sosial ini, maka, resolusi jihad begitu cepat menyebar secara massive karena beberapa hal. Pertama, fatwa resolusi jihad dicetuskan oleh Kyai Hasyim Asyari, seorang ulama bereputasi besar, memiliki massa militan, terutama di kalangan pondok pesantren tradisional, yang juga diidentifikasi sebagai ulama pendiri NU. Hal ini sejalan dengan pandangan Geertz, yang menilai bahwa kyai merupakan pemegang otoritas doktrin keislaman dan tradisi keagamaan serta berbagai politik di dalam masyarakat (Geertz, 1960). Sehingga, reputasi tersebut menyebabkan fatwa resolusi jihad cepat diterima dengan keyakinan yang sangat tinggi. Fatwa resolusi jihad itu dijalankan dengan sepenuh hati karena lahir dari seorang ulama yang disegani dan jelas reputasinya. Kedua, pembingkai fatwa resolusi jihad itu dilakukan oleh para ulama di pondok pesantren, terutama ulama-ulama jaringan NU. Fatwa jihad mempertahankan NKRI itu kemudian dengan mudah dan cepat diterima oleh kalangan santri, yang kemudian ikut menggerakkan pemuda rakyat di lingkungannya. Ketiga, fatwa jihad sangat mudah dikonstruksi dan dibingkai di pondok pesantren, yang pada masa itu merupakan kelompok utama musuh penjajah Belanda. Sehingga, resolusi jihad telah memenuhi syarat ketiga gerakan sosial, yaitu pembingkai. Bingkai resolusi jihad dilakukan secara massive dan terus menerus oleh para ulama yang terkonsentrasi di pondok-pondok pesantren. Ulama NU menjadi kelompok terdepan yang menyambut seruan itu karena resolusi jihad dicetuskan oleh pendiri NU itu sendiri, yaitu Kyai Hasyim Asyari, yang memiliki reputasi dan dianggap sebagian kalangan sebagai seorang wali yang harus dipatuhi.

KESIMPULAN

Keberhasilan resolusi jihad yang disambut kalangan Islam pada awal kemerdekaan RI itu karena memenuhi tiga syarat gerakan sosial, yaitu adanya momentum proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, kemudian terjadinya mobilisasi sumber daya berupa massa militan yang lahir di pondok-pondok pesantren serta massivenya pembingkai fatwa resolusi jihad karena dijalankan oleh ulama-ulama di pondok pesantren dan dicetuskan oleh kyai bereputasi tinggi. Dari riset di atas menunjukkan bahwa resolusi jihad relevan dengan syarat-syarat dalam teori gerakan sosial. Resolusi jihad telah memenuhi ketiga persyaratan tersebut, yaitu momentum, mobilisasi sumber daya dan framing. Resolusi jihad tidak akan berhasil jika salah satu dari tiga syarat di atas tidak terpenuhi. Sehingga, jika diterapkan di masa kini atau di masa mendatang,

maka keberhasilan atau kegagalan resolusi jihad sangat bergantung pada pemenuhan syarat-syarat gerakan sosial tersebut.

Fatwa resolusi jihad tidak akan berhasil misalnya, jika dicetuskan oleh ulama yang tidak memiliki reputasi. Tanpa reputasi, maka proses pembingkaihan tidak akan berlangsung secara massive dan mudah. Kemudian, resolusi jihad baru akan terjadi jika adanya kesempatan politik, yang pada masa itu momentumnya adalah proklamasi kemerdekaan. Tanpa adanya momentum proklamasi kemerdekaan, resolusi jihad tidak akan disambut massive dan justru gerakan itu akan dipandang sebagai upaya makar atau pemberontakan. Dan resolusi jihad tidak akan berhasil tanpa adanya agen-agen yang mengkonstruksinya, yaitu para ulama yang memiliki basis kuat di masyarakat. Massa akan bergerak secara kolektif jika ada mobilisasi sumber daya, baik berupa materi maupun mobilisasi rasa kecewa yang mendalam terhadap struktur sosial yang ada. Dalam menyambut resolusi jihad, masyarakat muslim termobilisasi tidak hanya mengobarkan jiwa, para kaum wanita dan pengusaha-pengusaha kaya juga ikut membantu perjuangan dengan mengobarkan hartanya.

Sumbangsih yang diberikan riset ini sangat bermanfaat untuk membaca fenomena gerakan sosial di masa yang akan datang. Jika para ulama hendak mengeluarkan fatwa jihad, maka, keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh prasyarat di dalam gerakan gerakan sosial. Jangan mencoba-coba untuk menerbitkan fatwa, jika ada satu saja syarat yang tidak dipenuhi. Karena itu hanya menjadi kesia-siaan dan akan gagal. Sehingga riset ini telah memperkaya referensi dalam konteks teori gerakan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Airlangga. (2016). *Nasionalisme Islam: Studi Pemikiran Politik H.O.S Cokroaminoto*. Universitas Indonesia.
- Amin, S. (2020). PERJUANGAN UMAT ISLAM UNTUK INDONESIA ABAD 20. *JURNAL AL-AQIDAH*, 10(2), 83–101. <https://doi.org/10.15548/ja.v10i2.2207>
- Azizi, A. (2005). *Allah pun Ber-Salawat kepada Nabi: Rahasia & Keberkahan Salawat Atas Nabi Muhammad SAW*. Zahra Publishing House.
- Bizawe. (2016). *Masterpiece Islam Nusantara sanad dan jejaring ulama santri*. Yayasan Comapas Indonesiatama.
- Darban. (1990). *Islam di Tengah Perjuangan Bangsa Indonesia*. Gading Publishing dan Paramadina.

- Dhofier. (2015). *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa depan Indonesia*. LP3ES.
- Farih. (2017). Pendidikan Inklusif Berbasis Kearifan Lokal Dalam Praktik Sosial di Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur. *Proceedings Ancom For Muslim Scholars*, 715–725.
- Geertz. (1960). *The Religion of Java*. The University of Chicago.
- Gunaji. (2009). *Resolusi Jibad NU 1945, Peran dan Militer NU dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI*. UIN Sunan Kali Jaga.
- M, F. (2017). PONDOK PESANTREN DAN CIRI KHAS PERKEMBANGANNYA. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 12–20. <https://doi.org/10.26618/jtw.v1i1.348>
- Mehden. (1957). *Islam and the Rise of Natiolism in Indonesia*. University of California.
- Novia. (2018). Peran Laskar Hisbullah Dalam Mempertahankan Kemerdekaan RI Pada Perang 10 November 1945 di Surabaya. *Jurnal Sejarah Dan Peradaban Islam*, 36–59.
- Royani. (2018). PESANTREN DALAM BINGKAI SEJARAH PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA. *Jurnal Islam Nusantara*, 121–128.
- Saputra. (2019). RESOLUSI JIHAD : NASIONALISME KAUM SANTRI MENUJU INDONESIA MERDEKA. In *Jurnal Islam Nusantara*.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *ke-26*. PT Alfabet.
- Suryanegara. (n.d.). *Api Sejarah: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Salmadani.
- Wardah, E. S. (2010). Kiprah Ulama dalam Politik Pada Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia (1942-1945). *Al Fath*, 4(1), 82–89. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32678/alfath.v4i1.3358>
- Yanto. (2019). *Dinamika Kultur Politik NU*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Zuhri. (2008). *Guruku Orang-orang Pesantren*. LKIS.

Website :

- Azyumardi Azra. 2015 “Nasionalisme, Etnisitas dan Agama” dalam situs <https://islamalternatif.com/nasionalisme-etnisitas-dan-agama>. Diakses tanggal 23 September 2021, pukul 07.57 Wib.
- Firman Noor dalam makalah berjudul “Menimbang perjuangan kebangsaan sarekat Islam (SI) dan relevansinya bagi kehidupan politik bangsa saat

ini”. Diunduh pada istus
<https://kolomsejarah.wordpress.com/2008/06/11/hebatnya-sarekat-islam-dahulu-kala/> tanggal 23 September 2021 pukul 09.11 Wib.
<http://lipi.go.id/lipimedia/peran-ulama-yang-bikin-sekutu-jera/16924>
<https://www.nu.or.id/post/read/72250/resolusi-jihad-nu-dan-perang-empat-hari-di-surabaya->